

Sejak tahun 2000 terjadi tren penurunan pengeluaran pertahanan di seluruh dunia, namun di Asia Tenggara, secara keseluruhan pengeluaran pertahanan justru mengalami kecenderungan peningkatan. Hal ini menyebabkan keseimbangan kekuatan antara Indonesia dengan negara-negara yang berbatasan dengannya mulai berubah. Buku ini ingin melihat berapa besar kecenderungan ancaman tradisional yang dihadapi Indonesia di lingkungan strategisnya.

Metode untuk menentukan tingkat ancaman ini adalah dengan menghitung *security need index* (SNI) Indonesia, dilihat dari tingkat militerisasi negara-negara yang berhubungan langsung dengan perbatasan Indonesia. Dengan asumsi '*natural balance of power*', kekuatan suatu negara dilihat tidak hanya dari kemampuan militer, tetapi juga dari kekuatan ekonomi mereka. Tingkat militerisasi dilihat dari tingkat kapabilitas militer suatu negara melalui *Global Military Index* (GMI).

Dari temuan penelitian terlihat bahwa secara absolut tingkat militerisasi negara-negara ASEAN termasuk tinggi, sehingga tingkat ancaman yang dihadapi oleh Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat. Bahkan di era reformasi, negara-negara lingkungan strategis Indonesia terus meningkatkan kekuatan militer mereka. Hal ini patut diwaspadai dan diperhatikan, karena dapat menjadi potensi ancaman akibat kekuatan yang tidak seimbang antar negara.

Dengan situasi tersebut, negara-negara ASEAN seharusnya dapat saling bekerja sama dan saling mengingatkan sebagai kawan, serta program-program pertahanan dapat ditujukan untuk menjaga pertumbuhan perekonomian nasional dan perdamaian di kawasan.



Penulis kelahiran Jakarta ini mengenyam pendidikan S1 yang diselesaikan pada Institut Teknologi Bandung dan Universitas Padjadjaran, serta menyelesaikan pendidikan S2 dan S3 di Universitas Indonesia. Mayor keahlian doktoral adalah ekonomi, terutama ilmu ekonomi internasional dan ekonomi pertahanan dengan disertasi berjudul "Kebijakan Anggaran Pertahanan dan Pengaruhnya pada Perekonomian Nasional". Berpengalaman mengajar di berbagai universitas, seperti Universitas Kristen Indonesia, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Universitas Kristen Maranatha, dan Telkom University. Dikenal juga sebagai Peneliti Perbatasan dan kerap menjadi Nara Sumber dan Tenaga Ahli.



Wonocolo Utara V/18 Surabaya
+628977416123
globalaksarapers@gmail.com



Dr. Posma Sariguna Johnson Kennedy

TELAAH ANCAMAN TRADISIONAL ANTAR NEGARA



Tel. 021-2511111

021-2511111

021-2511111

021-2511111

021-2511111



TELAAH ANCAMAN TRADISIONAL ANTAR NEGARA

Dr. Posma Sariguna Johnson Kennedy

Telaah
Ancaman Tradisional
Antarnegara

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

**PASAL 113
KETENTUAN PIDANA
SANKSI PELANGGARAN**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dr. Posma Sariguna Johnson Kennedy, S.T., S.E.,
M.Si., M.S.E.

Buku Referensi

Telaah
Ancaman Tradisional
Antarnegara



TELAAH ANCAMAN TRADISIONAL ANTARNEGARA

*Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia
oleh Penerbit Global Aksara Pres*

ISBN: **978-623-5874-47-0**

xiv + 130hal; 15,5 x 23 cm

Cetakan Pertama, Desember 2021

copyright © 2021 Global Aksara Pres

Penulis : Posma Sariguna Johnson Kennedy, S.T., S.E., M.Si., M.S.E.

Penyunting : Muhamad Basyrul Muvid, M.Pd.

Desain Sampul: Ahmad Afif Hidayat

Layouter : Ika Fatria Iriyanti

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Diterbitkan oleh:

CV. Global Aksara Pres

Anggota IKAPI, Jawa Timur, 2021,

No. 282/JTI/2021

Jl. Wonocolo Utara V/18 Surabaya

+628977416123/+628573269334

globalaksarapres@gmail.com



PRAKATA

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan buku ini dengan baik. Buku ini merupakan buku referensi berupa seri penelitian penulis mengenai kajian ancaman tradisional atau militer yang merupakan bagian dari ilmu ekonomi pertahanan. Akhirnya penelitian-penelitian dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 ini dapat dikumpulkan dan disajikan secara komprehensif di dalam satu buku ini.

Penelitian-penelitian yang disusun dalam sebuah buku ini sebagian besar merupakan serial penelitian mengenai ancaman tradisional yang merupakan bagian dari ekonomi pertahanan, yang sebagian besar dituliskan dalam *Fundamental Management Journal* (FMJ) yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia, salah satu tempat penulis mengabdikan menjadi dosen pada Program Studi Manajemen. Penelitian pertama dari buku ini, penulis terbitkan pada *Proceeding of 1st PICKS*, November 2014.

Dengan selesainya buku ini, penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, yang telah berkenan membantu dalam proses penyusunan hingga buku ini berhasil diselesaikan. Penulis berharap agar buku ini bisa menjadi sebuah referensi bagi yang membutuhkan dan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ekonomi pertahanan. Akhir kata tidak ada manusia yang sempurna, karena itu penulis bersedia menerima kritik dan saran jika terjadi kesalahan dalam buku ini untuk perbaikan di kemudian hari.

Jakarta, 10 Desember 2021

Posma Sariguna Johnson Kennedy

DAFTAR ISI

Prakata	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar	xi
Ringkasan	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PERMASALAHAN DAN METODOLOGI	7
2.1 Latar Belakang.....	7
2.2 Pandangan Indonesia terhadap Ancaman dan Pertahanan Nasional.....	8
2.3 Identifikasi Masalah.....	12
2.4 Metodologi.....	13
BAB III ANCAMAN TRADISIONAL.....	16
3.1 Definisi Keamanan dan Pertahanan	16
3.2 Ancaman Eksternal	18
3.3 Perkembangan Spektrum Ancaman	20
BAB IV AMBISI DALAM PENINGKATAN PERTAHANAN.....	23
4.1 Motivasi Suatu Negara Menentukan Besaran Pertahanan.....	23

4.2	Hipotesis Ketakutan akan Ancaman (<i>Fear Hypothesis</i>).....	24
4.3	Hipotesis Ambisi (<i>Ambition Hypothesis</i>).....	28
4.4	Hipotesis Legitimasi (<i>Legitimation Hypothesis</i>).....	30
BAB V	KEKUATAN DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL.....	34
5.1	<i>Hard Power</i> dan <i>Soft Power</i>	34
5.2	<i>National Power</i>	36
5.3	Bentuk Kekuatan Suatu Negara.....	39
BAB VI	NATURAL BALANCE OF POWER.....	42
6.1	<i>Balance of Power</i>	42
6.2	Situasi Mengancam.....	44
6.3	Reaksi Negara terhadap Ancaman.....	48
6.4	Bagan Situasi Mengancam secara Komprehensif	54
BAB VII	NATIONAL POWER.....	57
7.1	Indeks Kekuatan Nasional (<i>National Power Index</i>).....	57
7.2	Penentuan Kapabilitas Suatu Negara atau <i>Power Index</i> dari Angang & Honghua.....	66
BAB VIII	KEKUATAN NEGARA-NEGARA DI LINGKUNGAN STRATEGIS INDONESIA.....	73
8.1	Perbatasan sebagai Lingkungan Strategis yang Penting	73

8.2	Keseimbangan Kekuatan Negara-Negara di Perbatasan.....	77
BAB IX	ANALISA ANCAMAN SECARA Kuantitatif.....	86
9.1	Studi Mengenai Indeks Ancaman	86
9.2	<i>Global Military Index</i> sebagai Kapabilitas Militer Suatu Negara.....	89
9.3	Indeks Ancaman (<i>Security Need Index</i>) Indonesia.....	94
BAB X	TINGKAT MILITERISASI NEGARA-NEGARA ASEAN	102
10.1	Tingkat Militerisasi Negara-Negara ASEAN	102
10.2	<i>Global Military Indeks</i> Negara-Negara ASEAN Periode Tahun 2009-2012	110
10.3	Ancaman Eksternal dari Lingkungan Strategis Indonesia	115
BAB XI	KESIMPULAN DAN SARAN	120
11.1	Kesimpulan	120
11.2	Saran	122
Referensi		124
Biodata Penulis		130

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Komponen-Komponen Utama dari Kekuatan Fisik (<i>Physical Power</i>)	38
Tabel 2	Perilaku Negara-Negara dalam Model <i>Deterrence</i>	49
Tabel 4	Penelitian-Penelitian yang Menunjukkan Perkembangan Pembentukan <i>Power Index</i>	61
Tabel 5	Sumber-Sumber Daya dan Rata-Rata Tertimbang yang Terlibat dalam Perhitungan <i>National Power Index</i>	71
Tabel 6	Indeks Kekuatan Nasional (<i>National Power</i>) Antar Negara	77
Tabel 7	Indeks Kekuatan Nasional Indonesia.....	78
Tabel 8	Indeks Kekuatan Nasional Malaysia.....	79
Tabel 9	Indeks Kekuatan Nasional Filipina	79
Tabel 10	Indeks Kekuatan Nasional Singapura	80
Tabel 11	Indeks Kekuatan Nasional Thailand	80
Tabel 12	<i>National Power</i> Indonesia dan Negara di Perbatasan	81
Tabel 13	Perubahan Kekuatan Nasional Negara di Perbatasan	83
Tabel 14	Indeks Kekuatan Nasional China dan Amerika.....	84

Tabel 15	Indikator-Indikator Penyusun <i>Global Military Index</i>	90
Tabel 16	<i>Global Military Index</i> dari Indonesia dan Negara-Negara Tetangga.....	95
Tabel 17	Rangking <i>Global Military Index</i>	96
Tabel 18	Lingkungan Strategis dari Negara-Negara di Wilayah Perbatasan Indonesia	97
Tabel 19	Indeks Relatif <i>Capability</i> Negara-Negara di Wilayah Perbatasan dan <i>Security Need Index</i> Indonesia	99
Tabel 20	Jumlah Tentara Indonesia dan Negara-Negara Tetangga	104
Tabel 21	Jumlah Tentara per Luas Wilayah antar Negara	105
Tabel 22	Jumlah Tentara per Populasi antar Negara.....	106
Tabel 23	Anggaran Militer antar Negara.....	107
Tabel 24	Anggaran Militer per GDP antar Negara	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Anggaran Militer Negara-Negara ASEAN.....	4
Gambar 2.	Gambar Kerangka Pemikiran	14
Gambar 3.	Fear Hypothesis.....	27
Gambar 4.	<i>Ambition Hypothesis</i>	29
Gambar 5.	<i>Legitimation Hypothesis</i>	33
Gambar 6.	Asumsi Kebijakan-Kebijakan untuk Mempengaruhi.....	37
Gambar 7.	Kurva Balancing of Power	46
Gambar 9.	<i>Bargaining Model</i> untuk Persenjataan Konvensional.....	52
Gambar 10.	Diagram Situasi Mengancam yang Dihadapi Suatu Negara.....	55
Gambar 11.	Faktor-faktor Pembentuk Kekuatan Nasional.....	70
Gambar 12.	Peta Indonesia dengan Lingkungan Strategisnya	75
Gambar 13.	Kekuatan Sumber-Sumber Daya Indonesia (% dunia).....	81
Gambar 14.	<i>National Power</i> Antar Negara	82
Gambar 15.	Kekuatan Nasional Negara-Negara Indonesia, India, China, dan Amerika Serikat.....	85

Gambar 16.	Indeks Pengeluaran Militer dari Negara ASEAN.....	92
Gambar 17.	Indeks Personel Militer dari Negara ASEAN.....	92
Gambar 18.	Indeks Persenjataan dari Negara ASEAN	93
Gambar 19.	Grafik Besaran GMI dari Negara-Negara di Lingkungan Strategis Indonesia	96
Gambar 20.	Grafik Indeks <i>Relative Capability</i> dari Negara-Negara di Lingkungan Strategis Indonesia.....	99
Gambar 21.	Ancaman yang Dihadapi Indonesia	101
Gambar 22.	Anggaran Pertahanan Indonesia	103
Gambar 23.	Jumlah Personil Tentara antar Negara	104
Gambar 24.	Anggaran Militer Negara-Negara ASEAN (PPP, current \$)	108
Gambar 25.	Anggaran Pertahanan per GDP antar Negara.....	109
Gambar 26	(1) Jumlah Tentara Total (2) Total Populasi (3) Rasio Tentara terhadap Angkatan Kerja	111
Gambar 27	(1) Anggaran Militer (PPP, current US\$), (2) GDP (PPP, current US\$), (3) Rasio Anggaran Militer terhadap GDP (%).	112
Gambar 28.	GDP Negara-Negara ASEAN.....	112
Gambar 29	Gambar 30. <i>Global Military Index</i> (GMI) Negara di Asia Tenggara.....	115

RINGKASAN

Sejak tahun 2000 terjadi tren penurunan pengeluaran pertahanan di seluruh dunia, namun di Asia Tenggara, secara keseluruhan pengeluaran pertahanan justru mengalami kecenderungan peningkatan. Hal ini menyebabkan keseimbangan kekuatan antara Indonesia dengan negara-negara yang berbatasan dengannya mulai berubah. Buku ini ingin melihat berapa besar kecenderungan ancaman tradisional yang dihadapi Indonesia di lingkungan strategisnya.

Metode untuk menentukan tingkat ancaman ini adalah dengan menghitung *security need index* (SNI) Indonesia, dilihat dari tingkat militerisasi negara-negara yang berhubungan langsung dengan perbatasan Indonesia. Dengan asumsi '*natural balance of power*', kekuatan suatu negara dilihat tidak hanya dari kemampuan militer, tetapi juga dari kekuatan ekonomi mereka. Tingkat militerisasi dilihat dari tingkat kapabilitas militer suatu negara melalui *Global Military Index* (GMI).

Dari temuan penelitian terlihat bahwa secara absolut tingkat militerisasi negara-negara ASEAN termasuk tinggi, sehingga tingkat ancaman yang dihadapi oleh Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat. Bahkan di era reformasi, negara-negara lingkungan strategis Indonesia terus meningkatkan kekuatan militer mereka. Hal ini patut diwaspadai dan diperhatikan, karena dapat menjadi potensi ancaman akibat kekuatan yang tidak seimbang antar negara.

Dengan situasi tersebut, negara-negara ASEAN seharusnya dapat saling bekerja sama dan saling mengingatkan sebagai kawan, serta program-program pertahanan dapat ditujukan untuk menjaga pertumbuhan perekonomian nasional dan perdamaian di kawasan.

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam mencapai tujuannya, setiap negara akan selalu menjaga kedaulatan wilayahnya dengan pertahanan yang kuat untuk menangkalkan gangguan-gangguan dari negara-negara di sekitarnya. Dengan adanya perubahan yang demikian cepat dan jumlah penduduk dunia terus bertambah, tentunya perebutan wilayah-wilayah ekonomi juga sering terjadi. Perebutan wilayah perbatasan dengan motif utama penguasaan sumber daya alam baik yang terbarukan (*renewable resources*) maupun tak terbarukan (*non-renewable resources*) perlu diwaspadai.

Jika wilayah kedaulatan negara diganggu oleh negara-negara tetangga, maka keberadaan dan kehormatan suatu bangsa mengalami ancaman. Stabilitas keamanan lingkungan strategis sudah seharusnya menjadi bagian dari kepentingan nasional, sehingga setiap negara berkepentingan untuk mencermati perkembangan situasi yang mengancam perdamaian kawasan dan stabilitas regionalnya.

Walaupun di era globalisasi saat ini, fenomena tumbuh dan berkembangnya masyarakat internasional tidak lagi dihalangi oleh garis batas negara, namun secara realitas hubungan antar negara masih didominasi oleh isu-isu tradisional, seperti perbatasan negara. Fenomena ini menempatkan keamanan nasional dan kedaulatan wilayah suatu negara sebagai prinsip dasar yang penting dalam hubungan antar negara.

Globalisasi dan perdagangan bebas yang berlangsung di berbagai belahan dunia telah mempertajam persaingan antar bangsa dalam mempertahankan kepentingan ekonominya. Demikian pula persaingan antar negara-negara maju dalam bidang ekonomi telah memicu

penguasaan sumber-sumber ekonomi di dunia, seperti energi, dan sumber daya alam lainnya. Kondisi ini juga telah menimbulkan keresahan akibat praktek perdagangan bebas antar negara dan antar kawasan yang berpotensi memicu ketegangan hubungan, serta pertikaian kepentingan antar negara. Negara-negara yang lemah dalam sistem keamanan nasionalnya tentu akan menanggung risiko yang lebih besar.

Pandangan tradisional menganggap bahwa wilayah negara akan menentukan kedaulatan, kekuasaan, bahkan keamanan. Berdasar pandangan ini, perbatasan nasional memainkan peranan penting dalam menentukan eksistensi suatu negara. Negara akan siap melakukan apapun untuk melindungi wilayah dan kemungkinan ancaman keamanan sehingga perlu dukungan militer yang kuat. Wuryandari (2009)

Menurut pengertian tradisional, definisi keamanan terkait erat dengan kekuatan militer. Karakteristik khusus ancaman tradisional ini adalah berasal dari luar negara dengan para aktornya adalah suatu negara, sehingga memerlukan persenjataan berat dan modern untuk menghadapinya. Menurut pengertian tradisional, definisi keamanan terkait erat dengan kekuatan militer. Agar negara aman, kemampuan militer yang kuat harus dimiliki, atau bersekutu dengan negara lain untuk menghadapi berbagai ancaman.

Inilah yang membedakannya dengan ancaman internal, dimana musuh yang dihadapi bukanlah berbentuk negara, namun kelompok atau orang per orang, persenjataan lawan yang dihadapi pun cenderung lebih sederhana. Dengan demikian perilaku untuk menghadapi ancaman internal ini akan sangat berbeda dengan ancaman eksternal. Berbicara mengenai pertahanan, konotasinya adalah kemampuan negara dalam menghadapi ancaman tradisionalnya, atau ancaman eksternal, dimana negara harus melindungi warga negaranya terhadap ancaman-ancaman dari negara-negara lain terutama dari lingkungan strategisnya.

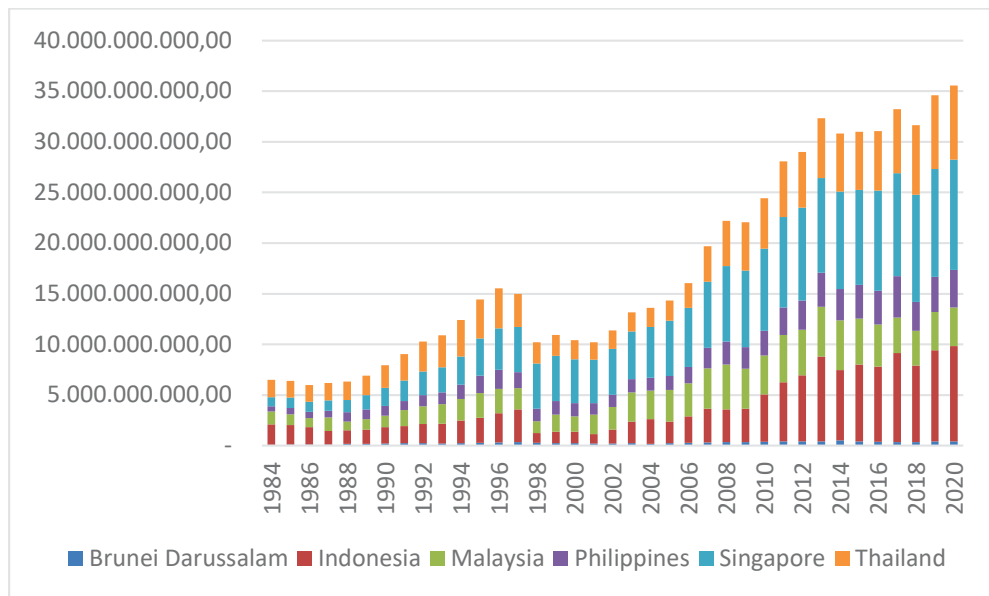
Tugas pertahanan adalah kewajiban pertama negara, selain menyelenggarakan peradilan, dan menyelenggarakan pekerjaan umum. Jenis barang “bela negara” ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, namun tidak ada yang mau memproduksinya, atau bisa juga dihasilkan oleh pihak swasta tetapi dalam jumlah terbatas. Barang semacam itu disebut barang publik.

2 | Telaah Ancaman Tradisional Antarnegara

Barang publik, seperti pertahanan negara, jalan raya, pekerjaan umum, dan lain-lain, dalam ketentuannya, seluruh atau sebagian asetnya dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal produk swasta, barang-barang tersebut dapat diproduksi oleh perusahaan swasta, tetapi juga dapat diproduksi oleh perusahaan negara, seperti kereta api, jasa penerbangan, dan lain-lain. Barang publik juga dapat disediakan oleh perusahaan swasta atau perusahaan negara. Misalnya, pembiayaan jalan tol negara dilakukan melalui APBN, tetapi jalan tersebut bisa dilakukan oleh swasta atau pemerintah sendiri.

Pertahanan memiliki peran penting dalam perekonomian, terutama dalam menghadapi ancaman. Ancaman saat ini selalu dikaitkan dengan kekuatan militer secara proporsional dengan perekonomian suatu negara. Tingkat militerisasi yang terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan kemampuan ekonominya dianggap sebagai ancaman bagi negara-negara sekitarnya. Sebaliknya, kekuatan di bidang ekonomi dengan persaingan yang sehat diharapkan sebagai kekuatan nasional. Siapa yang memiliki pertahanan dan ekonomi yang kuat dapat mengendalikan hubungan internasional di lingkungan strategisnya.

Periode tahun 1986-2000 terjadi tren penurunan pengeluaran pertahanan di seluruh dunia. Akan tetapi untuk kondisi di Asia, pengeluaran pertahanan justru menunjukkan tren meningkat. Sebelum Asia mengalami krisis keuangan pada tahun 1997-1998, pengeluaran militer dari negara-negara Asia meningkat secara cepat. Bahkan setelah krisis, walaupun menurun sedikit, tetap kembali meningkat sejak tahun 2000. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik anggaran militer khusus untuk negara-negara ASEAN di bawah ini:



Sumber: Hasil olah data dari *World Development Indicator (current \$)*

Gambar 1. Anggaran Militer Negara-Negara ASEAN

Peningkatan pengeluaran militer ini tentunya dapat meningkatkan eskalasi keamanan regional. Walaupun Asia mampu meningkatkan kemakmuran ekonominya, negara-negara masih didera oleh berbagai isu keamanan, baik dalam bentuk tradisional maupun non-tradisional. Isu-isu penting banyak bermunculan, seperti kesenjangan sosial ekonomi, ancaman ketersediaan energi, komunikasi garis laut, kemungkinan penurunan pariwisata akibat ancaman terror, dan lain-lain. Asia pun rawan akan instabilitas, seperti adanya konflik perang antar warga, ketidakamanan, konflik etnis, perang-perang yang muncul secara temporer, dan terorisme telah merusak hubungan antara negara dengan lainnya.

Bagi pemerintah di negara-negara Asia, kekuatan persenjataan memainkan fungsi utama untuk menjaga keamanan internal. Dalam banyak kasus, negara-negara telah mengalami transisi menuju pendewasaan demokrasi, hal ini dapat menyebabkan perselisihan antar politisi, antar warga, antar etnik, antar agama, ketidakadilan sosial yang dapat menyebabkan instability dan insecurity. Dengan adanya perubahan politik dan lingkungan ekonomi, perlu adanya misi militer yang baru, tidak

hanya dalam bidang anggaran, tetapi juga mengantisipasi ancaman dari luar termasuk ancaman keamanan lintas negara, seperti lalu lintas narkoba, migrasi ilegal, penurunan kualitas lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, dan operasi perdamaian. (Smith P. & Peterman, 2000).

Akibat adanya ketidakstabilan politik, keamanan internal, dan ancaman dari luar (*external threats*) kepada negara, telah menjadikan alasan secara umum bagi negara-negara di Asia untuk menyediakan sumber-sumber daya bagi pengeluaran militer. Ancaman eksternal mengacu kepada aktor-aktor yang menimbulkan ancaman adalah negara. Dengan demikian kesiapan persenjataan yang modern dan mahal harus disiapkan. Hal ini berbeda dengan ancaman internal yang cenderung asimetris, dimana gangguan-gangguan keamanan, cenderung tidak melibatkan persenjataan berat dan modern. Karena berbicara mengenai pertahanan maka berkonotasi terhadap kemampuan negara menghadapi ancaman tradisionalnya atau ancaman eksternal, dimana negara harus melindungi warga negaranya terhadap ancaman-ancaman dari negara-negara lain terutama dari lingkungan strategisnya.

Sesuai dengan kondisi ASEAN, ancaman diperlakukan sebagai laten atau potensial dibanding sebagai ancaman aktif. Negara lebih menekankan pada kekuatan fundamental yang menyebabkan pandangan terhadap ancaman lebih implisit daripada eksplisit. Ancaman fundamental lebih dilihat dari keamanan nasional secara potensial yang berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan pertahanannya. Dari kondisi selama ini belum terlihat gesekan-gesekan yang signifikan antar negara. Walaupun sering terjadi kasus-kasus di wilayah perbatasan, belumlah dikategorikan sebagai agresi. Peperangan dan perlombaan senjata dapat dikatakan tidak terjadi antar negara. Tidak terdapat pula pengembangan senjata nuklir dan pemusnah masal lainnya di kawasan.

Walaupun belum terdapat gesekan-gesekan yang signifikan di antara negara-negara Asean dan keadaan *security dilemma* (perlombaan senjata), namun hal ini tidak boleh membuat negara lengah untuk menganalisa potensi ancaman eksternal di wilayah/lingkungan strategisnya. Salah satu cara untuk melihat potensi ancaman antar negara adalah dengan melihat tingkat militerisasi antar negara.

Ancaman tradisional ini tetap penting untuk diperhatikan walau dalam masa damai-pun, karena pertahanan berinteraksi dengan ekonomi melalui fungsi melindungi negara dari ancaman tersebut. Meski tampaknya kebijakan dan pengeluaran pertahanan tidak secara langsung mempengaruhi perekonomian, ada dampak kritis yang menciptakan keamanan. Dengan adanya keamanan, perekonomian dapat berjalan dengan optimal. Sebaliknya, perekonomian juga mempengaruhi pertahanan melalui besarnya anggaran pertahanan yang disediakan oleh pemerintah.

Berdasarkan berbagai paparan tersebut di atas, tujuan penulisan buku yang bersumber dari berbagai penelitian penulis ini, adalah untuk mengetahui teori-teori mengenai ancaman tradisional, kekuatan negara (*national power*), tingkat militerisasi suatu negara, dan juga menjelaskan tingkat ancaman yang dihadapi Indonesia terhadap negara-negara di lingkungan strategisnya.

Ilmu yang mempelajari semuanya ini adalah ilmu ekonomi pertahanan. Melihat cakupannya, bidang ekonomi pertahanan melibatkan berbagai variasi sub-disiplin, terutama ekonomi, termasuk yang paling penting adalah ekonomi publik. Pendekatan yang digunakan selain itu adalah bidang mikroekonomi dan makroekonomi.

Ekonomi pertahanan, merupakan bidang ekonomi yang berkaitan dengan dampak ekonomi dari pengeluaran militer, manajemen ekonomi pada masa perang, dan pengelolaan anggaran militer pada masa damai (Britania). Ekonomi pertahanan menerapkan alat-alat ekonomi untuk mempelajari isu-isu terkait pertahanan termasuk kebijakan dan industri pertahanan, konflik, perlombaan senjata, perlucutan senjata, konversi, pemeliharaan perdamaian, pemberontakan, perang saudara, dan terorisme.

Ketika menerapkan alat-alat ini, para ekonom pertahanan harus menyesuaikan metode ekonomi, baik teoretis maupun empiris, dengan masalah dan kebijakan pertahanan, sambil mempertimbangkan aspek kelembagaan yang menjadi ciri bagian pertahanan (Sandler & Hartley, 1995)

BAB II

PERMASALAHAN DAN METODOLOGI

2.1 Latar Belakang

Pemerintah akan dapat melaksanakan tugasnya hanya apabila negara dalam keadaan aman, sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk mewujudkan keamanan nasional. Keamanan nasional diartikan sebagai kondisi atau keadaan yang bersifat nasional dan menggambarkan terbebasnya negara, masyarakat dan warga negara dari segala bentuk ancaman dan atau tindakan, baik yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Keamanan nasional juga bisa diartikan sebagai kebutuhan untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi negara melalui kekuatan ekonomi, militer dan politik serta pengembangan diplomasi. (Sekretariat Jendral Dewan Ketahanan Nasional, 2010)

Perlindungan kepada segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia diartikan sebagai perlindungan keamanan kepada segenap warga negara dan wilayah Indonesia beserta seluruh sumber daya yang ada di dalamnya. Dalam konteks ini, “keamanan” dipandang sebagai sebuah produk, sehingga keamanan sesungguhnya adalah “milik” warga negara. Dengan kata lain, keamanan adalah barang publik (*public goods*) yang harus dapat dinikmati secara bersama-sama oleh seluruh warga masyarakat. Untuk itu negara harus mentransformasi aspirasi keamanan dari masyarakat menjadi sebuah produk yang bernama “keamanan”.

Indonesia memiliki posisi yang strategis dan merupakan jalur lalu lintas dunia yang sangat penting. Terletak diantara benua Asia dan Australia, serta Lautan Pasifik dan Lautan India. Indonesia merupakan

negara kepulauan dengan luas 1.919.440 km² terdiri dari 17.504 buah pulau besar dan kecil, memiliki sekitar 81.900 km garis pantai, serta 75 persen (5,8 juta km²) wilayahnya berupa laut.

Indonesia memiliki lingkungan strategis dimana wilayah daratannya berbatasan langsung dengan Malaysia di Kalimantan dan Papua Nugini di Papua. Kawasan perbatasan kontinen tersebut tersebar di tiga pulau, empat propinsi dan 15 kabupaten/kota yang masing-masing wilayah memiliki karakteristik kawasan perbatasan berbeda-beda.

Wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini. Kawasan-kawasan perbatasan wilayah laut Indonesia umumnya berupa pulau-pulau terluar yang berjumlah 92 pulau. Diantara 92 pulau tersebut terdapat 12 pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Pulau-pulau tersebut merupakan titik terluar yang mempengaruhi luas wilayah teritorial Indonesia dan berpotensi menjadi konflik teritorial dengan negara tetangga.

2.2 Pandangan Indonesia terhadap Ancaman dan Pertahanan Nasional¹

Pertahanan negara merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI dengan segala isinya sebagai satu kesatuan pertahanan. (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2008).

Sistem Pertahanan Nasional bersifat semesta bercirikan kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Ciri kerakyatan mengandung makna bahwa orientasi pertahanan diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Ciri kesemestaan mengandung makna bahwa seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Ciri

¹ Dalam Kennedy P.S.J, 2017. Pertahanan Indonesia dan Pandangan Mengenai Ancaman serta Ambisi pada Setiap Era Kepemimpinan Indonesia, *Fundamental management journal*, Volume:2 No.2. ISSN: 2540-9816 (print) 2540-9220 (online). DOI: <https://doi.org/10.33541/fjm.v2i2.523>

kewilayahan merupakan gelar kekuatan pertahanan yang tersebar di seluruh wilayah NKRI, sesuai dengan kondisi geografi sebagai satu kesatuan pertahanan.

Dalam melihat strategi utama nasional yang telah dilaksanakan oleh para pemimpin bangsa serta konsekuensinya terhadap cara pandang penyelenggaraan pertahanan, perlu dilakukan tinjauan sejarah untuk melihat pengalaman yang dapat bermanfaat di masa depan. Tujuan tulisan ini adalah untuk melihat perbedaan cara pandang dalam penyelenggaraan pertahanan negara pada setiap masa atau era rezim pemerintahan. Metode penelitian yang dilakukan adalah kajian pustaka dengan meninjau data-data sekunder yang berupa buku-buku, paper atau dokumen-dokumen lainnya.

Ancaman, konflik atau bahkan perang merupakan fenomena yang usianya setua umur umat manusia. TB Simatupang (1985) menulis bahwa pengetahuan tentang perang adalah masalah sangat penting bagi negara, yang dapat menentukan hidup matinya suatu negara, apakah merupakan jalan ke arah keamanan atau ke arah keruntuhan. Karena pentingnya perang, perang itu melekat pada eksistensi negara-bangsa, sehingga setiap negara menyadari keberadaannya dan dipandang berkepentingan untuk memikirkan kemungkinan perang. Ini berarti setiap negara pada hakekatnya akan selalu memikirkan suatu kekuatan/kondisi dalam rangka mendukung perang atau mengantisipasi perang. TB Simatupang juga mengingatkan suasana perang bukan berarti tidak ada damai, suasana damai bukan berarti tidak ada perang/konflik.

Sejarah perang memberi fakta bagaimana kekuatan militer suatu negara dengan dukungan berbagai fasilitas/peralatan militer memberi keunggulan dan keuntungan walaupun itu jauh lebih merugikan jika dibandingkan tidak dalam keadaan perang. Perang zaman sekarang bersifat total karena seluruh wilayah bisa menjadi medan perang. Sebagai akibatnya seluruh rakyat menjadi terlibat dan mengalami akibat-akibat perang. Perang masih terlalu sering dipakai untuk menyelesaikan konflik kepentingan antar aktor (negara-bangsa). Walaupun demikian sejarah menunjukkan bahwa kesadaran dan keinginan aktor negara untuk dapat menyelesaikan konflik di antara mereka dengan jalan damai selalu diupayakan (Sulfa, 2008).

Pada masa pemerintahan Orde Lama, konsepsi pertahanan keamanan ditetapkan untuk kepentingan menghadapi serangan Belanda dan sekutunya, baik dalam Agresi Militer Pertama maupun Agresi Militer Kedua. Selanjutnya konsepsi tersebut diberdayakan untuk menghadapi pemberontakan dalam negeri, menghadapi Belanda dalam rangka merebut kembali Irian Jaya (Trihora) ke dalam NKRI, konfrontasi dengan Malaysia (Dwikora), serta upaya menyelamatkan negara dari kehancuran di segala bidang kehidupan rakyat. Secara umum konsep pertahanan ini digunakan untuk mengamankan kemerdekaan dan keutuhan negara.

Pada saat itu Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibangun dengan tujuan menghadapi segala ancaman yang bersifat militer, baik dari negara lain maupun pemberontakan dalam negeri. Pada saat yang bersamaan, kepemimpinan internasional Soekarno membawa Indonesia aktif di percaturan politik dunia dengan membentuk organisasi Non-Blok yang bersifat netral di antara pertikaian ideologi militer antara Pakta Warsawa dan NATO dalam Perang Dingin.

Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, terjadi perubahan kebijakan pada masa prakonfrontasi dengan Malaysia dan pembebasan Irian Barat. Soekarno semakin bergeser dengan mempromosikan kebijakan luar negeri yang lebih condong kepada Uni Soviet dan China. Hal ini seiring dengan meningkatnya persaingan antara legitimasi Soekarno, militer, dan PKI di dalam negeri. Karenanya, upaya-upaya peningkatan kekuatan angkatan bersenjata menjadi berlipat ganda, dan berkaitan dengan modernisasi perlengkapan militer serta kemampuan personil.

Semasa kebijakan Orde Lama berbagai operasi militer dikerahkan dalam menumpas pemberontakan yang terjadi di berbagai daerah. Ini menunjukkan bahwa tindakan militer dilakukan lebih kepada hard politics, dibandingkan dengan soft politics melalui resolusi damai atau diplomasi. Pada awalnya soft politics memang dilakukan pada masa-masa awal kemerdekaan yang ditunjukkan dengan adanya berbagai perjanjian perdamaian antara Indonesia dan Belanda. Akan tetapi kekuatan militer tetap selalu disiagakan untuk menjaga kedaulatan negara, mengingat Belanda juga menggunakan hard politics untuk menekan Indonesia melalui Agresi Militer Belanda II.

Pemikiran atau ideologi Soekarno sangat mencurigai neo-kolonialisme, yang dikatakannya sebagai bentuk penjajahan baru melalui kekuatan kapitalisme dan imperialisme. Maka secara logis pertahanan negara dibentuk dengan pembangunan kekuatan postur militer yang kuat. Kebutuhan atas kekuatan militer yang besar pada saat itu untuk mempertahankan dan mengamankan kemerdekaan Indonesia melahirkan konsep mengenai pelibatan rakyat dalam perang, yang dikenal dengan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Bakrie, 2007).

Setelah jatuhnya Presiden Soekarno pada tahun 1965, Indonesia dihadapkan pada kondisi sosial politik yang tidak menentu dengan perekonomian yang buruk. Presiden Soeharto mendapatkan legitimasi untuk memimpin perubahan nasional mengarahkan tujuannya pada pembangunan negara. Saat era Orde Baru ini, militer menjadi jauh lebih aktif terlibat dalam kehidupan politik dengan peran dan kesempatan yang sangat besar untuk menjalankan berbagai urusan sipil yang dilegitimasi melalui Dwi Fungsi ABRI. Militer memiliki hak-hak istimewa yang besar dalam politik yang pada dasarnya bertujuan untuk melindungi status quo. Militer berfungsi lebih pada menciptakan ketertiban dan berkonsentrasi pada ancaman internal dari pada menghadapi ancaman eksternal.

Setelah era Orde Lama, pemerintah melaksanakan pembangunan dengan menekankan pada faktor ekonomi. Namun demikian dalam pergaulan internasional, situasi lingkungan tidak selalu bergerak dalam suasana harmonis. Terdapat berbagai kepentingan yang tidak selalu sejalan sehingga dapat menimbulkan gesekan-gesekan atau konflik. Hal ini tentunya menimbulkan ancaman bagi negara yang kepentingannya tidak bisa diterima oleh negara lain.

Pemerintahan Orde Baru lebih mempromosikan konsep Ketahanan Nasional yang menekankan pada dimensi internal dan digunakan untuk menciptakan stabilitas negara. Sedangkan untuk kebijakan politik luar negerinya, pemerintah menerapkan *soft politics* dengan tujuan menciptakan keseimbangan kepentingan di Asia Tenggara. Tampak pemerintah Orde Baru lebih bersifat “mengamankan” kepentingan internal melalui kebijakan luar negeri yang mendukung diplomasi sebagai resolusi damai. Dengan kebijakan politik ini, maka kekuatan militer dibangun dengan perspektif tersebut. Walaupun fakta menunjukkan bahwa pada tahun

1976, pemerintahan Orde Baru berhasil membawa Timor-Timur menjadi bagian dari Indonesia, tetapi secara keseluruhan, konsentrasi pertahanan pada masa Orde Baru tetap bersifat internal (Bakrie, 2007).

Pada masa transisi demokrasi, sejak berakhirnya pemerintah Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia telah melalui proses era empat kepemimpinan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden untuk periode 2004-2009 dan 2009-2014. Terdapat perubahan yang mendasar, reformasi TNI dilakukan yang lebih ditujukan untuk menghadapi ancaman eksternal sebagai tugas pertahanan negara. Secara umum misi TNI bersifat eksternal, tetapi posturnya belum dibangun berdasarkan perspektif internasional. Hal ini terkait dengan lebih mengedepankannya supremasi sipil dalam memandang posisi Indonesia di percaturan politik internasional.

Dalam periode reformasi ini, kebijakan luar negeri Indonesia terlihat bersifat idealis, atau menekankan diplomasi damai dalam perselisihan antar negara. Namun dalam prakteknya harus disadari bahwa, ketika diplomasi tidak dibangun atau ditopang oleh kondisi ekonomi atau postur militer yang kuat, maka tingkat efektifitasnya pun juga rendah. Kebijakan yang diberikan pemerintah hanya menciptakan stabilitas nasional yang kuat, dan secara ekonomi sangat kondusif bagi investasi asing. Penerapan kebijakan ini dapat dikatakan asosiatif dengan kebijakan pemerintah Orde Baru, sehingga pembangunan terhadap postur TNI masih mengikuti kebijakan Orde Baru. Akan tetapi sebenarnya pada era reformasi ini, undang-undang mengamanatkan secara khusus bahwa TNI memiliki tugas pertahanan yang bersifat eksternal (Bakrie, 2007).

2.3 Identifikasi Masalah

Keamanan sangat berkaitan erat dengan ancaman, khususnya terhadap ancaman tradisional yang dieliminir pemerintah melalui anggaran pertahanan yang dikeluarkannya. Dengan meningkatnya tingkat ancaman maka pelaku ekonomi akan bekerja dengan perasaan tidak aman, demikian pula sebaliknya. Sehingga perlu dianalisa kebijakan di bidang pertahanan apakah sudah mampu mengeliminir ancaman yang ada dan dapat mendukung perekonomian. Untuk itu, dalam penelitian ini akan dijawab

bagaimanakah pengaruh pengeluaran pemerintah untuk pertahanan nasional terhadap perekonomian.

Berdasarkan berbagai gambaran yang telah dipaparkan sebelumnya, tujuan penulisan buku ini, yang bersumber dari berbagai penelitian penulis, adalah untuk mengetahui teori-teori mengenai ancaman tradisional, kekuatan negara (*national power*), tingkat militerisasi suatu negara, dan juga menjelaskan tingkat ancaman yang dihadapi Indonesia terhadap negara-negara di lingkungan strategisnya.

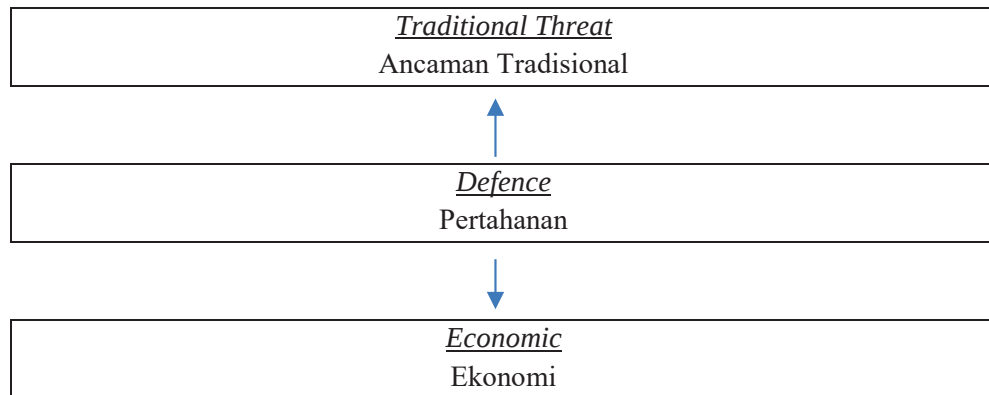
Berbagai permasalahan yang diungkapkan dan akan dibahas dalam buku ini adalah:

- Apakah yang disebut sebagai ancaman tradisional dari suatu negara
- Bagaimana motivasi suatu negara dalam meningkatkan pertahanannya
- Apakah *balance of power*, dan bagaimana *natural balance of power* bisa terbentuk.
- Bagaimanakan menghitung *national power* suatu negara
- Bagaimana kekuatan dari negara-negara di lingkungan strategis Indonesia
- Bagaimana menghitung ancaman secara kuantitatif, terutama dalam situasi damai.
- Bagaimana tingkat militerisasi negara-negara ASEAN

2.4 Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian di buku ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Konsepnya adalah mengkonstruksi dokumen dan data-data yang tersebar menjadi sebuah hasil temuan yang lebih bermakna dan mudah dipahami. Metode ini berfokus pada bagaimana mendapatkan data dan mengolahnya sehingga bermakna. Makna yang dimaksud adalah nilai di balik data yang tampak, sehingga penelitian berfokus pada tujuan untuk menjawab permasalahan penelitian.

Berikut kerangka pemikiran dalam penelitian dalam buku ini:



Gambar 2. Gambar Kerangka Pemikiran

Sesuai Gambar 2, buku ini ingin menjelaskan bahwa peran pertahanan negara itu penting bagi perekonomian nasional dengan cara mengeliminir ancaman, terutama ancaman tradisional, sehingga para agen atau pelaku-pelaku ekonomi dapat melakukan kegiatan ekonominya pada tingkat yang paling efisien atau optimal.

Penggunaan Metode Kualitatif

Dari pertanyaan apakah manfaat pertahanan negara di era perdamaian (tidak ada perang di lingkungan strategis internasional suatu negara), perlulah dijelaskan fenomena yang ada secara kualitatif berdasarkan literatur dan dokumen-dokumen sekunder yang ada.

Kajian pustaka dilakukan untuk melihat perkembangan pendapat setiap ahli dalam setiap teori yang muncul, misalnya bagaimana memperhitungkan kekuatan nasional dari negara-negara di dunia melalui indeks kekuatan nasional. Analisa kekuatan yang akhirnya mengerucut pada suatu konsep *natural balance of power*, akan dilakukan melalui metodologi *literature review* sebagai tinjauan ekonomi normatif.

Dengan demikian penelitian kualitatif yang digunakan dalam buku ini bersifat deskriptif dan eksplanatori. Dimana, kajian yang menggambarkan suatu situasi yang kompleks, dan menjelaskan tentang hubungan antar peristiwa dengan makna tertentu

Penggunaan Metode Kuantitatif

Metode penelitian kuantitatif juga digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian, misalnya untuk melihat bagaimana kekuatan nasional dari setiap negara dihitung sehingga dapat dilihat keseimbangannya (*balance of power*).

Tingkat ancaman walaupun memiliki konsep sangat abstrak, dilihat melalui tingkat militerisasi suatu negara. Karena itu perlu sebuah indeks kuantitatif untuk memproksinya. Terinspirasi dari Lebovitz & Ishaq (1987) yang menyatakan bahwa ancaman fundamental berasal dari *basic external security needs* dari suatu negara, maka dalam menterjemahkan ancaman dibentuk indeks kebutuhan akan keamanan atau *security need index* (SNI).

Sampai saat ini masih sangat sulit menentukan tingkat ancaman secara kuantitatif, karena itu *Global Military Indeks* (GMI) dapat digunakan untuk melihat keadaan ini berdasarkan tingkat militerisasi suatu negara. GMI merupakan indeks yang menggambarkan kapasitas kekuatan persenjataan atau tingkat militerisasi terhadap kecenderungan peningkatan atau penurunan persenjataan dalam suatu negara.